**Implementasi Program Gerakan Ramah Lingkungan di Kelurahan
Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang**
*Implementation of the Environmentally Friendly Movement Program
in Takat and Kelurahan 17 Ilir, Palembang City*

Fitri Herdayani

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia
Diterima: 25 Juni 2020; Disetujui: 14 Juli 2020; Dipublish: 18 Juli 2020

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Lingkungan Di Kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang. Metode penelitian berupa penelitian kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Lingkungan di Kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik, hal itu dilihat dari beberapa dimensi dan indikator semuanya telah dilaksanakan dan direspon dengan baik oleh masyarakat di Kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang seperti: komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas sudah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian adalah konsistensi, perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus tetap atau tidak berubah-ubah sudah dilaksanakan dengan baik, serta pembersihan aliran air terutama di lingkung sekolah perkantoran dan lingkungan warga secara silih berganti pada tiap RW. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah tersedianya staf sudah dilaksanakan dengan baik oleh. Informasi, seorang implementor harus mengetahui apa yang mereka kerjakan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik. Pengangkatan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan rutin yang menjadi dasar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Program Gerakan Ramah Lingkungan, Implementasi, Kebijakan

Abstract

The purpose of this study was to determine the Implementation of the Environmentally Friendly Movement Program in the Stairs of Takat and 17 Ilir in Palembang. The research method in the form of qualitative research. The results of the analysis show that the implementation of the Environment Friendly Movement Program in the Takat and 17 Ilir Kelurahan in Palembang City has been carried out well, it is seen from several dimensions and indicators all of them have been implemented and responded well by the community in Tangga Takat Kelurahan and 17 Ilir Kota Kelurahan Palembang such as: the communication received by the implementers of the policy must be clearly implemented properly. The conclusion of the study is consistency, the order to implement a policy must be fixed or not changing well implemented, and cleaning up the water flow, especially in the office school environment and residents' neighborhoods alternately in each RW. The main resource in implementing the policy is the availability of staff that has been implemented well by. Information, an implementor must know what they are doing when they are given orders to carry out a policy that has been implemented well. Appointment of people who have the ability to implement established policies have been implemented well. Routine activities that are the basis for implementing policies in accordance with established standards have been implemented well.

Keywords: Green Movement Program, Implementation, Policy

How to Cite: Herdayani, F. (2020). Implementasi Program Gerakan Ramah Lingkungan Di Kelurahan Tangga Takat Dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang, *PERSPEKTIF*, 9 (2) (2020): 453-464.

*Corresponding author:
E-mail: fitriherdayani@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN 2541-5913 (Online)

PENDAHULUAN

Upaya umat manusia menyelamatkan bumi, diawali pada konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang lingkungan hidup manusia pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia pertemuan yang mengusung slogan hanya satu bumi, waktu itu merupakan perwujudan kesadaran masyarakat dunia, akan pentingnya penanganan masalah lingkungan hidup secara bersama-sama. Setelah konferensi itu, Negara-negara diseluruh dunia mulai terlibat dalam berbagai proses penyelamatan lingkungan. Seluruh Negara terlibat dalam penilaian dan perencanaan lingkungan, mempersatukan pendapat dan kepedulian Negara maju dan Negara berkembang bagi penyelamatan bumi menggalakkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan prioritas serta prinsip-prinsip lingkungan.

Keinginan mulia masyarakat dunia untuk mewariskan bumi yang lestari bagi anak cucu, terus didengungkan baik pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro Brazilia tahun 1992, konferensi PBB tentang tujuan pembangunan Millennium tahun 2000, maupun pada konferensi tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002.

Masalah lingkungan hidup adalah masalah kita bersama. Lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah Negara, kawasan atau benua. Semuanya berpijak pada satu bumi yang sama, yang harus dipelihara, dan dilestarikan. Penanganannya harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia dimuka bumi ini (Dongoran, et. al., 2018; Purba, et. al., 2017). Namun cita-cita luhur untuk mewariskan dunia ini bagi generasi yang akan datang, masih perlu terus menerus digalakkan dan diwujudkan bersama-sama.

Tingginya komitmen pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintah yang baik sulit mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula (Keraf, 2000). Mengingat permasalahan lingkungan perlu perhatian yang serius, pemerintah melalui Kementrian Negara Lingkungan Hidup merespon permasalahan lingkungan dengan

mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau. Program menuju Indonesia hijau merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan konservasi Sumber Daya Alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Program ini merupakan suatu instrument pengawasan lingkungan hidup yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam menganalisis Peraturan Perundang-undangan Konservasi Sumber Daya Alam dan pengendalian kerusakan lingkungan di daerahnya masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program gerakan ramah lingkungan adalah 1) penanaman pohon peneduh bisa pohon yang bersifat produktif / tanaman hias dan tanaman apotik hidup, 2) penyediaan tempat sampah, 3) pemilahan sampah dan pengelolaannya menjadi pupuk kompos.

Program gerakan ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang bukanlah murni program yang dicetuskan sendiri oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melainkan mengadopsi program yang telah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Kelompok masyarakat ini telah berhasil menciptakan kawasan lingkungan pemukiman yang asri dan hijau, serta melakukan pemilahan terhadap sampah rumah tangga, menyediakan tempat sampah yang tertutup serta melakukan pengelolaan sampah baik yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi suatu produk yang baru maupun mengelola sampah menjadi pupuk kompos.

Keberhasilan kelompok masyarakat Banjarsari menjadikan kampung tersebut sebagai kampung percontohan penghijauan dan pengolahan sampah sejak tahun 1996. Sejak menjadi kampung percontohan masyarakat Banjarsari melalui ketua pelopor gerakan peduli lingkungan melakukan sosialisasi kedaerah-daerah untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam pengelolaan lingkungan sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan.

Untuk membentuk suatu gerakan kampung ramah lingkungan dimulai dari membentuk Rukun tetangga (RT) menjadi

kawasan yang teduh dan asri, dimana setiap rumah tangga (termasuk rumah toko / Ruko) dikawasan Rukun Tetangga (RT) tersebut melakukan penanaman pohon peneduh atau hias dan tanaman apotik hidup, setiap rumah tangga menyediakan tempat sampah yang tertutup dan setiap rumah tangga melakukan pemisahan antara sampah basah dan sampah kering serta mengelola sampah menjadi pupuk kompos. Bila rumah tangga tidak memungkinkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara sendiri-sendiri, pengelolaan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos.

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) yang ramah lingkungan dilanjutkan dengan membentuk rukun tetangga (RT) baru yang ramah lingkungan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya dari rukun tetangga yang telah ramah lingkungan akan membentuk suatu kampung yang ramah lingkungan pula.

Pada tahun 2007 melalui bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang, program kampung ramah lingkungan mulai diimplementasikan. Namun pada akhir 2007 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (sekarang BLH) menerima limpaan kewenangan untuk melaksanakan program tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dalam menerima limpaan kewenangan, dengan membentuk tim kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui gerakan ramah lingkungan berdasarkan Surat keputusan Kepala Bapedalda Kota Palembang No. 660 / 02 / KPTS / Bapedalda tanggal 18 Februari 2008.

Program gerakan ramah lingkungan ini ditujukan kepada semua camat dan lurah sekota Palembang sebagai tenaga penggerak dalam wilayah kerja masing-masing untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam Implementasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam program gerakan ramah lingkungan. Program gerakan kampung ramah lingkungan dapat dijadikan tolak ukur kinerja camat dan lurah dalam menganalisis program tersebut. Keseriusan camat dan lurah dalam menindak lanjuti program dilihat dari jumlah kawasan yang dijadikan kawasan kampung ramah lingkungan yang sesuai dengan kriteria

kampung ramah lingkungan yaitu kampung yang teduh dan hijau (terdapat pohon peneduh / hias dan apotik hidup), penyediaan tempat sampah, pemilahan sampah serta melakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos di wilayah kerja masing-masing.

Mengingat program gerakan ramah lingkungan telah dianalisis sejak tahun 2007 perlu dilakukan monitoring terhadap kawasan yang diunggulkan oleh Kelurahan sebagai kawasan kampung ramah lingkungan. Melalui Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 496 Tahun 2008 tanggal 22 April 2008 dibentuk tim untuk memonitoring analisis program gerakan ramah lingkungan, penanggung jawab kegiatan monitoring adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Kota Palembang sebagai kota peraih Adipura mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Sesuai dengan misinya dalam pelestarian lingkungan hidup, pemerintah Kota Palembang telah berupaya menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dengan nama "Gerakan Ramah Lingkungan". Hal ini sesuai Surat Edaran Walikota Palembang No. 660.1/002259/Bapedalda tanggal 31 Oktober 2006 tentang Pembentukan Ramah Lingkungan yang merupakan suatu kawasan terkecil (RT) yang ramah lingkungan, hijau, bersih dan tertata dimana masyarakatnya memiliki kesadaran, kepedulian dan kerja keras serta komitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga dapat meningkatkan daya dukung lahan untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan dari program gerakan ramah lingkungan adalah untuk mewujudkan Kota Palembang bersih, hijau dan biru dengan melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah kota mewajibkan setiap kelurahan menyiapkan dua tempat percontohan "ramah lingkungan" guna menciptakan kawasan bersih dan apik. Selain itu setiap kelurahan juga diharapkan melaksanakan program **Tri Bina** yang terdiri dari **bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha** (Warta Kota Palembang, 2009)

Gerakan ramah lingkungan ini merupakan program lingkungan yang terpadu.

Program ini merupakan pengembangan dari RT/RW ramah lingkungan yang dilaksanakan pemerintah kota sejak tahun 2007. Setiap tahun, pemerintah menambahkan 2 kelurahan untuk menjadi gerakan ramah lingkungan. Prosedur pengajuan gerakan ini adalah melalui lurah. Lurah kemudian mengajukan ke camat untuk diteruskan kepada Bapedalda untuk dilakukan penilaian. Dalam konteks penilaian Adipura, jika di nilai layak maka kampung yang dinilai akan diusulkan kepada pemerintah untuk diusulkan jadi titik pantau Adipura.

Dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam program gerakan ramah lingkungan belum dilaksanakan. Seperti kawasan yang diunggulkan belum teduh dan hijau, masih banyak rumah tangga tidak mempunyai tanaman peneduh serta tanaman apotik hidup belum dilaksanakan oleh setiap rumah anggota masyarakat melainkan masih ditanam pada lahan kosong milik warga. Tempat sampah masih banyak yang tidak mempunyai tutup. Sampah rumah tangga masih tercampur antara sampah basah dan sampah kering. Sampah basah belum dikelola untuk menjadi pupuk kompos.

Merujuk Instruksi Walikota Palembang dalam rapat yang dipaparkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang tanggal 13 Mei 2008, mengharapkan di setiap kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan mempunyai minimal 4 lokasi rukun tetangga (RT) yang disiapkan sebagai kawasan kampung ramah lingkungan dan pada tahun berikutnya bertambah 2 lokasi RT baru sebagai kawasan kampung ramah lingkungan dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dari jumlah kelurahan yang ada di Kota Palembang yaitu 107 kelurahan.

Kelurahan Tangga Takat dari 38 yang ada baru 2 RT yaitu RT 01 dan RT 31, sedangkan di kelurahan 17 Ilir dari 18 RT ada 2 RT yang melaksanakan program kampung ramah lingkungan yaitu RT 12 dan RT 13. Adapun kriteria gerakan ramah lingkungan yang ada di kelurahan tersebut adalah adanya organisasi pengelola lingkungan hidup yang terstruktur (ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang berasal dari masyarakat di kampung tersebut). Kemudian ada kegiatan pemilahan dan pengomposan sampah, air bersih dan sanitasi lingkungan (drainase, septic tank, sebaran pohon penghijauan).

Harapan dari program gerakan ramah lingkungan, bila program gerakan ramah lingkungan telah berhasil dianalisis secara menyeluruh oleh masyarakat, akan membantu pemerintah di dalam mempertahankan piala Adipura yang menjadi penilaian tertinggi dalam mengukur komitmen pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mendeskripsikan masalah masih sedikitnya kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kampung ramah lingkungan.

Utari (2016), Judul Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang: Penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan terkait dengan Program Sekolah Ramah Anak serta faktor pendukung maupun penghambat dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak. Persamaan penelitian Ranti Eka Utari dengan peneliti ialah tentang Implementasi Program Gerakan Ramah Lingkungan, perbedaannya peneliti hanya fokus terhadap Program gerakan kampung ramah lingkungan sebagai tolak ukur kinerja camat dan lurah dalam menganalisis program tersebut.

Ardyatmoko et al., (2014), Judul Implementasi Kebijakan, Program Gerakan 1000 Bank Sampah, Pengolahan Sampah: Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota melalui implementasi program gerakan 1000 bank sampah guna menanggulangi permasalahan sampah di kota Tangerang. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah. Persamaan peneliti Luluk Ardyatmoko dengan peneliti yaitu meneliti mengenai implementasi kebijakan, perbedaannya peneliti hanya akan fokus pada program ramah lingkungan pada lingkungan kelurahan Kota Palembang.

Noor (2015), Judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau: Hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan persampahan Kota Baubau terjabarkan dalam sebuah program yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau. Temuan Penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam hal komunikasi yang dijalankan internal Dinas Kebersihan bagi pelaksanaan program belum berjalan optimal. Persamaan peneliti La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor dengan peneliti yaitu sama-sama memeliti tentang penggunaan model implementasi Edward III dalam implementasi kebijakan, perbedaannya peneliti membahas tentang implementasi kebijakan program pada lingkungan tingkat kelurahan.

Sudarwati (2012), Judul Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak (Studi Pada SDN 3 Pangungrejo Kabupaten Pringsewu): Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan pendekatan analisis deskriptif menggunakan model implementasi dengan pendekatan bottom up yang dikemukakan oleh Richard Elmore. Hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi dan kegiatan pada program Sekolah Ramah Anak telah sejalan dengan tujuan kebijakan serta mengacu dan berpedoman pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Program Gerakan Ramah Lingkungan, perbedaannya peneliti hanya fokus terhadap Program gerakan kampung ramah lingkungan sebagai tolak ukur kinerja camat dan lurah dalam menganalisis program tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian tentang Implementasi Program Gerakan Ramah Lingkungan di Kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2005) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian. Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif dari pada interpretasi

terhadap pengukuran data (Moleong, 2004). Sumber data berasal dari data primer, data sekunder serta data statistik yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber atau informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi. Adapun Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang. Metode penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik (*Purposive Sampling*). Dalam penelitian ini menggunakan informan kunci (*key informan*) dan informan biasa. Adapun untuk informan biasa antara lain : 4 orang warga RT 01 dan RT 31 Kelurahan Tangga Takat serta 4 orang warga RT 12 dan RT 13 Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III, dimana menurut Edwards III tahapan implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Penggunaan model ini juga mempertimbangkan bahwa kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan kebijakan yang berasal dari atas (Top Down) sehingga sangat relevan dengan konsep yang dikemukakan dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III.

Edward (1984), menekankan pada 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan model ini akan diketahui berbagai faktor pendorong dan penghambat terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Menurut Edward dalam (Winarno, 2007) ada 3 faktor penting dalam komunikasi, yaitu :

- 1) Transmisi yakni suatu keputusan harus diteruskan dari pelaksana yang paling atas sampai pelaksana yang paling bawah, sehingga akan ada suatu kesadaran dari semua pelaksana

kebijakan yang bersangkutan. Transmisi yang jelas akan membuat pejabat pelaksana akan menyadari bahwa suatu kebijakan telah dibuat, lengkap dengan aturandan tata caranya. Selain kepada para pelaksana komunikasi juga harus ditransmisikan kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program sekolah gratis. Informasi ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa telah ada kebijakan yang ditujukan untuk mereka.

- 2) Kejelasan merupakan kejelasan komunikasi mengenai tujuan dari keputusan. Setiap kebijakan tentu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini harus jelas dan fokus serta dapat dimengerti oleh para pelaksana. Apabila telah ada kejelasan dari tujuan maka pelaksana suatu keputusan akan mempunyai persepsi yang sama mengenai suatu tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Konsistensi yaitu sikap konsisten dari pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila perintah telah diteruskan kepada semua pelaksana dan mempunyai kejelasan, maka selanjutnya kesadaran dari pelaksana akan menimbulkan suatu pemahaman yang bertanggung jawab. Sikap ini harus dipertahankan dengan ketetapan hati agar dalam melaksanakan keputusan tertanam suatu tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan sesuai dengan aturan.

Program gerakan ramah lingkungan di lakukan guna mewujudkan kampung ramah lingkungan, maka pemerintah telah membuat "kriteria ramah lingkungan" sebagai berikut: (1) pemilahan sampah; (2) pengomposan; (3) sebaran pohon penghijauan; (4) penataan tanaman hias; (5) air bersih; (6) sanitasi lingkungan (drainase, wc, septic tank); (7) bersih dari sampah; (8) organisasi masyarakat yang

bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan; (9) apotik hidup; (10) tempat sampah (Warta Kota Palembang, 2009).

a. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas.

Guna merespon Gerakan Indonesia Berserri, kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang kembali berinisiatif untuk ikut serta dalam mensukseskan pencanaan gerakan tersebut melalui Program gerakan ramah lingkungan untuk menciptakan ruang terbuka di lingkungan kantor yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau sebagai media untuk menghasilkan oksigen. Kegiatan ini tercermin dalam suasana kantor yang memenuhi unsur, seperti Halaman Kantor yang Rindang, Lobby atau Ruang berbasic alam, dan Ruang Kerja Responsif Tumbuhan, dan lain lain.

Kelurahan Tangga Takat Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang merespon gerakan ramah lingkungan ini mengadakan kegiatan berupa Lomba Kebersihan, Keindahan, dan Kerapian bagi kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir yang berada di kota Palembang. Harapan dari kegiatan ini utamanya adalah agar lingkungan kelurahan tangga takat dan kelurahan 17 Ilir menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya yang ada di kota Palembang.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan demi terciptanya kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang yang Bersih, Sehat, Ramah lingkungan, Rapi, dan Indah melalui kebersihan, keindahan dan kerapian lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, indah dan rapi maka akan berdampak pada peningkatan motivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Dengan adanya Program gerakan ramah lingkungan yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan tentunya secara berangsur angsur menumbuhkan kesadaran masyarakat

untuk ikut mensukseskan program tersebut, karena kalau kelurahan kita bersih dan adanya penghijauan, maka akan terlihat bersih dan sehat.

Dari hasil penelitian terhadap Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan menggalakkan jumat bersih yang melibatkan unsur pemerintah dari kelurahan dan masyarakat sekitarnya.

b. Konsistensi, perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus tetap atau tidak berubah-ubah.

Merujuk pada Instruksi Walikota Palembang dalam rapat yang dipaparkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang tanggal 13 Mei 2008, mengharapkan di setiap kelurahan dan rukun tetangga (RT) yang disiapkan sebagai kawasan kampung ramah lingkungan.

Diharapkan gerakan ramah lingkungan pada kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang tidak hanya untuk Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. namun untuk kelurahan kelurahan lainnya agar terciptanya kota Palembang BARI. Dengan pelaksanaan Program gerakan ramah lingkungan pada kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang diharapkan dapat dapat melaksanakan program tersebut dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Dari hasil penelitian terhadap Konsistensi, perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus tetap atau tidak berubah-ubah sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan melaksanakan Instruksi Walikota Palembang tanggal 13 Mei 2008, dengan melakukan gotong royong membersihkan

sampah serta pembuatan bak bak sampah di kelurahan dengan tujuan agar warga tidak membuang sampah sembarangan, serta pembersihan aliran air terutama di lingkung sekolah perkantoran dan lingkungan warga secara silih berganti pada tiap RW.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Edward dalam (Winarno, 2007) mengungkapkan :

"Perintah-perintah mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber implementasi kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan terdiri dari jumlah staf yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas".

1) Staf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, staf adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa staf merupakan aktor utama dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan sangat diperlukan jumlah staf yang memadai yang dapat melaksanakan semua tugas yang telah direncanakan. Namun, jumlah staf yang banyak tidak akan selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.

2) Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah

pemberitahuan tentang sesuatu. Informasi akan membantu para pelaksana mengenai bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Menurut (Winarno, 2007) informasi mempunyai dua bentuk, yaitu :

- a) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan berupa petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.
- b) Data tentang ketaatan personil lain terhadap peraturan pemerintah.

2) Wewenang

Menurut (Koontz & O'donnell, 1955) mengemukakan bahwa kewenangan adalah suatu hak untuk bertindak atau memerintah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang telah disahkan atau dilembagakan. Hal ini akan bersumber pada sumber kewenangan.

4) Fasilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas adalah sarana untuk melaksanakan pelaksanaan fungsi. Fungsi pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Fasilitas yang lengkap akan mendukung tercapainya pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah diharapkan

a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah tersedianya staf.

Dalam pelaksanaan program ramah lingkungan di kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang pihak kelurahan berserta unsur pemerintah lainnya seperti ABRI dan staf Kecamatan telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, hal ini dilakukan agar adanya kebersamaan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan terutama di wilayah kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang. Jadi dengan adanya kerja sama tersebut dalam pelaksanaan program ramah lingkungan di Kelurahan tidak mengalami masalah

karena dikerjakan secara bersama sama terutama adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan yang ikut membantu kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan program ramah lingkungan di kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang pihak kelurahan berserta unsur pemerintah lainnya seperti ABRI dan staf Kecamatan sehingga adanya kebersamaan pihak kecamatan dan kelurahan serta ABRI dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

Dari hasil penelitian terhadap sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah tersedianya staf sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan dukungan dari dari kelurahan dan masyarakat sekitarnya.

b. Informasi, seorang implementor harus mengetahui apa yang mereka kerjakan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan suatu kebijakan.

Kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang merespon gerakan ramah lingkungan memberikan himbawannya agar setiap rumah memiliki tempat sampah, memberikan saluran air dan bagi yang memiliki halaman yang luas agar ditanami pohon untuk penghijauan. Sekarang tiap rumah telah dihimbau agar memberikan lingkungan dengan membuat tempat sampah dan menanam pohon, bagi mereka yang tidak memiliki tempat sampah agar dapat membuang sampah rumah tangga pada tempat yang telah disediakan khusus bagi masyarakat dari pihak Kecamatan.

Dari hasil penelitian terhadap Informasi, seorang implementor harus mengetahui apa yang mereka kerjakan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan mengajak

masyarakat untuk membuang pada tempat sampah yang telah ditentukan.

3. Disposisi/sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis (Subarsono, 2005). Kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menanggukkan pelaksanaan suatu kebijakan yang sesuai dalam rencananya untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda. Di samping itu para pelaksana mungkin menghindari dampak sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang secara selektif persyaratan-persyaratan paling tidak persyaratan bertentangan dengan pandanganpandangan mereka.

Hal-hal yang penting dicermati pada variable disposisi menurut Edwards III dalam (Agustino, 2006) adalah :

- 1) Pengangkatan Birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila para personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil kebijakan haruslah orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- 2) Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan adalah memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

a. Pengangkatan birokrat, bahwa pemilihan dan pengangkatan implementor harus orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari program ramah lingkungan pada kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang, kami memulai program berbasis masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam penanganan limbah perumahan dengan melalui pemilahan sampah, dan kegiatan penghijauan. Untuk mempertahankan program ini, kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang memiliki penggerak lingkungan yang bertindak sebagai agen perubahan yaitu pihak Kecamatan. kelurahan Tangga Takat telah disediakan 8 bak sampah untuk menampung 3200Kg sampah dan kelurahan 17 Ilir Palembang telah memiliki 5 Bak Sampah yang berhasil menampung lebih dari 2000 kg sampah. kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang merespon gerakan ramah lingkungan ini mengadakan telah membuat bak sampah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk membuang sampah, selain itu setiap minggu pihak kecamatan gotong royong dengan semua unsur kelurahan termasuk Rt dan RW setempat ikut serta melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan adanya gotong royong bagi setiap RT , maka diharapkan tingkat kebersihan lingkungan di setiap wilayah kelurahan akan terlihat bersih, karena kalau kelurahan kita bersih dan adanya penghijauan tentunya akan kelihatan perkampungan yang sehat. Dari hasil penelitian terhadap Pengangkatan birokrat, bahwa pemilihan dan

pengangkatan implementor harus orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan mengadakan kegiatan gotong royong pada tiap tiap Rt yang dilaksanakan setiap sebulan sekali.

4. Struktur Birokrasi

Edwards memfokuskan perhatiannya pada dua karakteristik dari struktur birokrasi yang umum yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin dan fragmentasi dalam pertanggung jawaban di antara unit-unit organisasi.

1) Prosedur kerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur kerja adalah kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting dalam implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya, dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi publik dan swasta (Wibawa et al., 1994).

2) Fragmentasi

Fragmentasi yang menjadi perhatian kedua dalam struktur birokrasi difokuskan pada bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, karena organisasi terdiri dari beberapa unit yang memiliki tugas dan pelimpahan wewenang dari pimpinan organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur organisasi dan cabangnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan

a. Melakukan *standard operating procedures* (SOP). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang menjadi dasar untuk melaksanakan kebijakan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Langkah langkah yang telah dilakukan oleh kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dalam rangkai pelaksanaan program ramah lingkungan ini melakukan yaitu:

- a. Penanaman pohon
- b. Kegiatan lomba dengan tema lingkungan
- c. Sanksi yang tegas pada pencemar lingkungan
- d. Pemasangan slogan-slogan bertema lingkungan

Dengan adanya kegiatan tersebut kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dapat memotivasi setiap kelurahan untuk memperhatikan masalah Kebersihan, Keindahan, dan Kerapian lingkungannya. Dengan adanya Program gerakan ramah lingkungan ini bukan hanya pemerintah kota Palembang saja yang bertanggung jawab akan tetapi setiap warga yang ada ikut bertanggung jawab.

Dari hasil penelitian terhadap Melakukan *standard operating procedures* (SOP). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang menjadi dasar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan Penanaman untuk menjaga keseimbangan ekologi di Kelurahan. Kegiatan lomba dengan tema lingkungan, Sanksi yang tegas pada pencemar lingkungan serta pemasangan slogan-slogan bertema lingkungan di wilayahnya masing masing.

b. Pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada unit-unit yang lebih kecil.

Kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang yang disiapkan sebagai kawasan kampung ramah lingkungan, akan tetapi untuk mendapatkan prestasi yang layak dijadikan titik picu bagi kelurahan di kota

Palembang. Guna mewujudkan kampung ramah lingkungan, maka pemerintah telah melaksanakan "kriteria ramah lingkungan" sebagai berikut: (1) pemilahan sampah; (2) pengomposan; (3) sebaran pohon penghijauan; (4) penataan tanaman hias; (5) air bersih; (6) sanitasi lingkungan (drainase, wc, septic tank); (7) bersih dari sampah; (8) organisasi masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan; (9) apotik hidup; (10) tps dan tempat sampah. Kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang yang berada di jajaran lingkungan pemerintah kota Palembang telah meninstruksikan pada setiap RT agar dapat melaksanakan program tersebut di wilayahnya masing-masing.

Dari hasil penelitian terhadap Pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada unit-unit yang lebih kecil sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan berusaha mewujudkan wilayah Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang menjadi wilayah pemukiman yang ramah, aman, nyaman, bersih, dan sehat.

SIMPULAN

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan menggalakkan jumat bersih yang melibatkan unsur pemerintah dari kelurahan dan masyarakat sekitarnya.

Konsistensi, perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus tetap atau tidak berubah-ubah sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan melaksanakan Instruksi Walikota Palembang tanggal 13 Mei 2008, dengan melakukan gotong royong membersihkan sampah serta pembuatan bak bak sampah di kelurahan dengan tujuan agar warga tidak membuang sampah sembarangan, serta pembersihan aliran air terutama di lingkungan sekolah perkantoran dan lingkungan

warga secara silih berganti pada tiap RW. Tersedianya staf sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan dukungan dari kelurahan dan masyarakat sekitarnya.

Implementor harus mengetahui apa yang mereka kerjakan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan mengajak masyarakat untuk membuang pada tempat sampah yang telah ditentukan. Pemilihan dan pengangkatan implementor harus orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan mengadakan kegiatan gotong royong pada tiap RT yang dilaksanakan setiap sebulan sekali.

Pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada unit-unit yang lebih kecil sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kelurahan Tangga Takat dan kelurahan 17 Ilir Kota Palembang dengan berusaha mewujudkan wilayah Kelurahan dalam Kota Palembang menjadi wilayah pemukiman yang ramah, aman, nyaman, bersih, dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Ardyatmoko, L., Yusuf, M., & Stiawati, T. (2014). *Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah Di Kota Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*. 8 (1): 47-64.
- Edward, G. C. (1984). *Public policy implementation*. JAI Press.
- Islamy, M. I. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Keraf, A. S. (2000). *Pustaka Filsafat ETIKA BISNIS, Tuntunan dan Relevansinya*. Kanisius.

- Koontz, H., & O'donnell, C. (1955). *Principles of management: an alyasis of managerial functions*.
- Moleong, L. J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Noor, I. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BAUBAU. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1).
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purba, E.S. dan Sri Y. (2017), Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 57-71.
- Ramadini Marniaty de Breving, dkk. (2015). Pengaruh Penerapan autramatic care terhadap respon kecemasan Anak Yang Mengalami Hospitalisasi di RSU Pancaran Kasi GMIM Manado dan RSUP DR. R D Kanadai Manado. *E Jurnal Keperawatan*, 3 Nomor 2.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi* (Vol. 138). Pustaka Pelajar.
- Sudarwati, T. M. (2012). *Implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup sekolah menengah atas negeri 11 semarang menuju sekolah adiwiyata*. Program Pascasarjana Undip.
- Sugiyono, P. (2005). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (1997). Pembinaan Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utari, R. E. (2016). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung: Tidak Diterbitkan*.
- Warta Kota Palembang. (2009). No Title. <https://wartakota.tribunnews.com/>
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. *Proses Dan Analisis, Intermedia, Jakarta*.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yousa, A. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. *Laboratorium Pengkajian Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Negara. Bandung: FISIP Universitas Padjajaran*.
- Surat keputusan Kepala Bapedalda Kota Palembang No. 660 / 02 / KPTS / Bapedalda tanggal 18 Februari 2008.
- Surat Edaran Walikota Palembang No. 660.1/002259/Bapedalda tanggal 31 Oktober 2006.